

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, dan adat istiadat yang kompleks. Wilayah yang luas membuat masyarakat berbeda-beda dan beragam. Keberagaman tersebut menjadi suatu keunggulan dalam suatu Negara apabila di akomodir dengan baik (Cahyono, 2017). Dalam berhubungan, manusia sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut bisa menambah keanekaragaman ide atau gagasan dalam berpendapat. Akan tetapi, terkadang perbedaan itu dapat menimbulkan perdebatan yang mengarah pada permusuhan atau konflik.

Tidak ada masyarakat yang bisa terhindar dari konflik, setidaknya yang disebut konflik nir-wujud atau *unreal konflik* (Siswanti, 2019). Contoh konflik yang ada di Indonesia ialah telah terjadi pengusiran mahasiswa di Jogjakarta, kondisi ini bermula saat ada salah satu mahasiswa yang mendukung adanya kemerdekaan untuk Papua Barat. (Ikki, 2022). Adanya pendapat ini tentu menimbulkan banyak kontra dari masyarakat sekitar Yogyakarta dan berniat untuk mengusir mahasiswa Papua Barat. Dari sini cukup jelas bahwa adanya perbedaan pendapat bisa menjadi penyebab utama timbulnya sebuah konflik. Hal seperti ini masih mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga konflik menjadikan perubahan sosial apalagi kebanyakan masyarakat sering lebih mudah terpancing emosi. Kondisi ini yang akhirnya membuat mereka bertindak di luar batas dan menyebabkan timbulnya kerugian hingga perpecahan.

Musyawarah dan mufakat menjadi media yang baik dan santun serta biasa dilakukan oleh berbagai elemen penting dalam masyarakat ketika ada persoalan yang dihadapi dan musyawarah mufakat menjadi warisan dari para leluhur bangsa Indonesia (Firmansyah, 2022). Musyawarah adalah cara merumuskan atau memutuskan sesuatu

berdasarkan kehendak banyak orang, meminta persetujuan dari banyak orang sehingga kebulatan dicapai, keputusan tidak harus didasarkan pada suara terbanyak, akan sesuai dengan keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan mufakat (Hafidzi et al., 2019).

Musyawarah mufakat merupakan kegiatan yang membahas mengenai persoalan yang dihadapi bersama demi mencapai sebuah solusi bersama (Pratiwi & Sunarso, 2018). Selain itu, musyawarah mufakat dilakukan untuk memperkuat tali silaturahmi kekeluargaan seperti yang tertera pada sila ke empat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Tujuan musyawarah ialah untuk memperoleh mufakat atau biasa disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut diperoleh guna menghindari pemungutan suara dimana hal tersebut untuk menghindari suara dari kelompok mayoritas dan kelompok minoritas yang nantinya hasil kesepakatan mungkin bisa disabotase atau dicurangi dan malah merugikan pihak tertentu. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan musyawarah mufakat justru digantikan dengan voting atau pemungutan suara. Hal tersebut bertentangan dengan hakikat musyawarah bahwa musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara berunding untuk menghasilkan solusi tanpa merugikan salah satu pihak dan keputusan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama.

Kegiatan musyawarah dinilai cukup efektif dilakukan dalam Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Rifaldi & Yusa, 2019). Penelitian lain tentang Pelaksanaan Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Rapat Karang Taruna memberikan hasil seperti, pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam rapat karang taruna: 1) Saling menghargai pendapat dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 2) menggunakan tutur kata yang baik dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 3) perlu adanya kesabaran dalam mengikuti rapat ketika

musyawarah untuk mufakat, 4) Bersedia berbicara dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 5) Bersedia mendengar pendapat orang lain dalam rapat ketika musyawarah untuk mufakat, 6) Memberi maaf kepada anggota rapat saat musyawarah untuk mufakat (Pamungkas, 2015). Berdasarkan penelitian di atas musyawarah dinilai cukup efektif dilakukan dalam perencanaan pembanguna dan pelaksanaan musyawarah untuk mufakat berjalan cukup baik. Maka, dari hal tersebut peneliti ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai bentuk musyawarah dalam mempengaruhi penanaman karakter peduli sosial warga.

Setiap warga negara perlu memahami bahwa musyawarah mufakat dapat memperkuat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkokoh pondasi NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila (Pamungkas, 2015). Bermusyawarah dalam mengambil keputusan itu sangatlah penting supaya terciptanya mufakat dan suatu pengambilan keputusan itu dirasa tepat sesuai keputusan bersama. Dengan bermusyawarah manusia dapat membahas isu-isu di lingkungan sekitar dan kegiatan sosial atau tindakan apa yang akan dilakukan manusia untuk menyelesaikannya.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Puspitasari, 2017). Oleh karena itu manusia memerlukan suatu kebersamaan dan saling peduli satu sama lain untuk melangsungkan hidupnya, walau terkadang manusia bisa melakukannya sendiri tetapi sebagian besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan orang lain, maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial dan manusia juga bagian atau komponen dari keberlangsungan kehidupan sosial itu sendiri.

Kehidupan sosial masyarakat merupakan proses yang intens dan kompleks. Seseorang akan berperilaku positif di lingkungannya supaya mereka mendapat perlakuan positif juga. Pentingnya sikap peduli sosial antar masyarakat sangat dibutuhkan, misalnya sebagai wujud toleransi

antar sesama, saling mengerti penderitaan satu sama lain, dan bentuk pengertian akan kesusahan yang sedang dialami seseorang. Kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga akan menciptakan keharmonisan dalam berbagai lapisan masyarakat (Sari et al., 2019).

Peduli sosial merupakan perilaku seseorang yang memberikan perhatian dan pertolongan pada orang lain dengan dilandasi sebuah kesadaran (Amaniyah & Nasith, 2022). Peduli sosial juga bisa diartikan empati pada orang lain yang dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing, perwujudan dari sikap peduli sosial bisa berupa materi seperti memberi bantuan makanan, uang, tempat tinggal dan lain-lain, kemudian yang bersifat non materi seperti memberi dukungan, semangat, nasihat, atau hanya senyuman yang membuat tentram.

Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar kita (Suyatman, 2016). Artinya peduli merupakan tindakan sopan dan santun, toleran terhadap perbedaan, tidak menyakiti orang lain, mampu bekerja sama dan terlibat pada kegiatan-kegiatan masyarakat. Karakter dapat dianggap sebagai nilai perilaku manusia hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, antar sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma yang ada (Asmaroini, 2016). Karakter peduli sosial merupakan sikap atau perilaku yang baik terhadap orang lain dan lebih dari pada itu, karakter peduli sosial ialah perilaku atau sikap manusia yang peka terhadap kebutuhan dan keadaan di lingkungan sekitarnya. Karakter peduli sosial dirasa penting untuk semua kalangan baik itu anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Karakter peduli sosial yang baik dapat menjadi modal yang positif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kepekaan sosial perlu di kembangkan lebih lanjut untuk mengurangi sifat egosentrisme dan mengembangkan rasa empati terhadap orang lain yang ada di sekitar. Nurhayati et al., (2020) Sikap kepekaan sosial dapat dicontohkan seperti, berbagi dengan orang lain, bersedia membantu orang lain yang membutuhkan, keberanian meminta maaf bila melakukan kesalahan, dan menghargai orang lain yang memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu kepekaan sosial harus dikembangkan terutama dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Masalah-masalah sosial kewarganegaraan akan menghambat terciptanya *good citizen* dimana hal tersebut merupakan tujuan dari setiap Negara (Tachyudin et al., 2020). Konsep *good citizen* sendiri ialah perilaku yang baik dalam hidup berbangsa dan bernegara, di Indonesia sendiri permasalahan dalam menjadi warganegara yang baik masih ada disekitar kita. Banyak tempat masih sering ditemukan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak mencerminkan sikap kepedulian sosial (Hendra, 2013). Hal ini muncul bukan sekedar alasan kemajuan teknologi dan zaman yang telah berubah, justru faktor dari dalam diri menjadi lebih berperan. Gejala individualisme membuat orang tidak lagi memperhatikan kondisi di sekitarnya. Perbuatan tersebut mencerminkan perbuatan orang yang tidak memiliki kepedulian sosial. Lunturnya karakter kepedulian sosial ini disebabkan oleh banyak hal antara lain adanya kesenjangan status sosial, sikap egois yang tinggi, kurangnya pemahaman nilai-nilai kepedulian sosial, kurangnya sikap toleransi, empati, dan simpati terhadap orang lain (Sukma & Jatningsih, 2022). Kurangnya rasa kepedulian sosial akan menimbulkan disintegrasi dan menghilangkan unsur integrasi itu sendiri.

Kegiatan masyarakat desa Bangunrejo yang melibatkan warga lingkup RT dan terbilang cukup aktif ialah kegiatan musyawarah lapanan RT. Kegiatan musyawarah lapanan RT biasanya dilakukan pada malam hari dan diikuti oleh kepala keluarga. Rangkaian acara pada kegiatan

musyawarah lapanan RT di desa Bangunrejo biasanya diawali do'a bersama, kemudian dilanjutkan arisan, lalu mulai musyawarah. Berbeda dengan desa lain di kecamatan sukorejo seperti di desa Kranggan, desa Nambangrejo, dan desa Karanglo Lor. Di desa tersebut tidak ada kegiatan musyawarah rutin yang melibatkan warga lingkup RT. Musyawarah rutin biasanya dilakukan dalam lingkup satu desa, diwakili oleh ketua RT serta tokoh masyarakat. Disana kegiatan yang melibatkan warga lingkup satu RT ialah arisan warga, dimana peserta arisan ialah laki-laki dan perempuan, dan waktu pelaksanaannya tiap selapan hari atau tiap 35 hari.

Lapanan atau selapanan awalnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperingati setelah 35 hari lahirnya bayi (Tri Pamungkas, 2022). Dalam hal ini, selapanan RT yang dimaksud ialah kegiatan pertemuan rutin warga lingkup satu RT di setiap 35 hari. Pak Dasuki selaku ketua RT 02/ RW 05 berpendapat bahwa manfaat dari lapanan RT bisa untuk menambah kedekatan antar warga, membahas masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, dan juga mencari solusi bersama. Selain itu kegiatan lapanan RT juga menjadi wadah bagi ketua RT untuk menyampaikan atau mensosialisasikan progam-progam yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi, seperti uraian diatas, persoalan mengenai lingkungan masih banyak terjadi dan dianggap layak untuk dibahas dalam musyawarah lapanan RT.

Berdasarkan temuan observasi awal, masalah-masalah mengenai kepedulian sosial masih ditemukan di lingkungan masyarakat Bangunrejo. Masih terdapat sebagian kecil warga memiliki ego yang besar dimana ia mementingkan kepentingan pribadinya dan malah mengakibatkan kerugian pada orang lain, seperti terdapat saluran drainase yang ditutup karena saluran tersebut masih ada di wilayah pekarangan pribadi warga. Masih ditemukan warga yang memarkirkan beberapa alat berat pemanen padi di pinggir jalan dan di pinggir saluran drainase yang mengakibatkan dinding drainase runtuh. Sebagian kecil warga yang memutar sound system dengan volume kencang dan mengganggu kenyamanan warga

lain. Sebagian kecil warga jarang hadir dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti menghadiri undangan hajatan, mengikuti kegiatan yasinan, dan tidak ikut serta dalam kegiatan kerja bakti lingkungan. Selain itu, terdapat drainase yang kurang terawat dan sudah mulai dangkal dimana saat musim hujan tiba air hujan akan meluber ke jalan dan halaman rumah warga sehingga jalan dan halaman rumah tersebut menjadi becek dan berlumpur. Terlebih lagi terdapat isu-isu mengenai bantuan sosial PKH yang dianggap kurang tepat sasaran.

Nilai-nilai yang ada pada Pancasila merupakan hal penting dalam kehidupan khususnya di Negara Indonesia, nilai tersebut dijadikan pedoman untuk masyarakat Indonesia dalam bertindak (Lestari et al., 2021). Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alenia ke empat pembukaan undang-undang dasar tahun 1945, cita-cita yang besar tersebut perlu direalisasikan dan diwujudkan oleh semua warga dan elemen masyarakat. Sikap peduli sosial warga merupakan bagian dari sikap untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia, menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, sikap peduli sosial juga merupakan realisasi dari nilai-nilai Pancasila sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ketiga “persatuan Indonesia”. Oleh karena itu, proses perwujudan cita-cita tersebut harus dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu. Seperti dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, GERMAS menjadi budaya pada setiap aspek kehidupan masyarakat, dan untuk membuatnya menjadi budaya, perlu dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu seperti lingkungan tempat kita bekerja Eko, (2022). Oleh karena itu, sama halnya dalam penanaman sikap peduli sosial warga, untuk menanamkan sikap tersebut perlu dilaksanakan dan dimulai dari lingkungan sekitar terlebih dahulu. Maka nantinya sikap tersebut akan tertanam menjadi karakter dalam setiap individu dan akan menular ke individu lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut menarik untuk diteliti bentuk musyawarah dalam menumbuhkan sikap peduli sosial. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti permasalahan dengan judul “Analisis Musyawarah Lapanan RT Dalam Penanaman Karakter Peduli Sosial Warga (Studi Kasus Di Desa Bangunrejo, Sukorejo, Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penjelasan latar belakang masalah mengenai analisis musyawarah lapanan rt dalam penanaman karakter peduli sosial warga, maka pokok permasalahan yang di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah lapanan RT dalam penanaman karakter peduli sosial warga?
2. Apa kendala yang dihadapi saat melaksanakan musyawarah lapanan RT dalam penanaman karakter peduli sosial warga?
3. Bagaimana solusi atau tindak lanjut dari kendala yang dihadapi saat musyawarah lapanan RT dalam penanaman karakter peduli sosial warga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk pelaksanaan musyawarah Lapanan RT dalam penanaman karakter peduli sosial warga.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi saat melaksanakan musyawarah Lapanan RT dalam penanaman karakter peduli sosial warga.
3. Untuk mendeskripsikan solusi atau tindak lanjut dari kendala yang dihadapi pada pelaksanaan musyawarah Lapanan RT dalam penanaman karakter peduli sosial warga.

D. Manfaat Penelitian

Berharap dengan adanya penelitian ini yang dilakukan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan keilmuan khususnya pada bidang kajian ilmu sosial kewarganegaraan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa terutama terkait masalah sosial kewarganegaraan dan mengenai sikap peduli sosial yang ada di sekitar kita.

b. Bagi Universitas

Penulis berharap, penelitian ini khususnya bagi Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat menjadi tambahan kekayaan hasil penelitian. Kemudian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan untuk menambah wawasan bagi warga Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai musyawarah dalam penanaman karakter peduli sosial warga.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat mengenai sikap peduli sosial sehingga bisa memperkuat rasa kebersamaan warga. Selanjutnya, penulis berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat menjadi sadar dan peduli mengenai persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masing-masing dan mencoba menyelesaikan masalah secara baik dan bersama-sama.